

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Akbar Kurnia Wahyudi, *Sengketa Pertanahan dan Solusi Hukumnya*, Surabaya, Prisma Mediatama, 2011
- Binoto Nadapdap, *Kamus Hukum Indonesia*, Jala, Jakarta, 2007
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989
- Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Bandung : Alumni, 2004
- Herman Hermit, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda*, Bandung, Mandar Maju, 2004
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Atas Tanah*, Surabaya : Arkola, 2002
- Muchsin, Imam Koeswahyono, *Hukum Agraria Indonesia Perspektif Sejarah*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- M. Ali Boediarto, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, Jakarta: Swa Justitia, 2005
- M. Isa Arif, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta, Intermasa, 1978
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi : Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, Bina Ilmu, 1985
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, edisi. kesatu, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Siti Hidayatul Hidayah, *Perlindungan Hukum di Negara Republik Indonesia*, Surabaya, Pukad Hali, 2004
- Sulaiman, *Rekontruksi Hukum Kebencanaan Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia*, Yogyakarta, Calpulis, 2017

Wirjono Prodjodikoro, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama, 2003

## **B. Jurnal**

Asyer Andawan, *Revitalisasi Hak Atas Tanah Yang Hilang Akibat Abrasi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960*, Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat. 2017

Dwi Susiati, Sri Setiadji, *Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Terkena Abrasi*, Jurnal Mimbar Keadilan, Volume 13 Nomor 1 Februari 2020

Himawari Kusumaningtyas, *Status Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat di Sepanjang Daerah Aliran Sungai di Kota Bandar Lampung*, Universitas Lampung

IGN. Sugangga, *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Hukum Pertanahan Adat di Wilayah Pantai Utara Jawa Tengah (Studi Kasus Penentuan Hak Tanah Timbul)*, Masalah-masalah Hukum UDIP, Vol. XXXI Nomor 2 April-Juni, 2002

Susetyo, Heru (2006), "Menuju Kebijakan Penanggulangan Bencana yang Integratif", Jurnal Inovasi Edisi: Vol.8/XVIII/November 2006 dalam <http://io.ppi-jepang.org/article.php?id=201>, diakses pada 27 November 2007

Suryani, Ira, *Analisis Abrasi Pantai Tuapeijat DI Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai*, Jurnal, STKIP PGRI Sumatera Barat Padang, 2014

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah

